



ANALISA KENAIKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF PENDANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

Darwin Hartono

Universitas Indraprasta PGRI

E-mail: darwinhartono.state@gmail.com

Abstrak: Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah harga patokan bagi kenaikan harga barang lain sehingga menimbulkan efek pengganda pada makro ekonomi inflasi harga barang dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini dikarenakan harga bahan bakar minyak merupakan faktor input utama dalam agregat supply pada perekonomian. Pada satu sisi, harga terpaksa dinaikkan agar mencegah kebocoran APBN karena subsidi yang begitu besar. Pada sisi lain, dengan kenaikan harga maka akan terjadi kenaikan harga barang lain yang berdampak bagi masyarakat kecil. Mencermati bahan bakar minyak merupakan salah satu cabang produksi hajat hidup orang banyak, pada UUD 1945 pasal 33 telah mengamanatkan untuk dikelola negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi literatur perhitungan subsidi bahan bakar minyak di Indonesia. Adapun perhitungan subsidi BBM sama dengan volume BBM dikalikan harga patokan yang telah dikurangi harga jual eceran (belum termasuk pajak). Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berarti pengurangan subsidi BBM akan berdampak adanya anggaran tambahan untuk pendanaan pembangunan di Indonesia. Tentunya kebijakan harus diikuti oleh beberapa kebijakan lainnya. Berikut saran yang dapat diajukan antara lain harus ada kenaikan pajak signifikan kepada produsen kendaraan dengan bahan bakar BBM diikuti dengan pengendalian dan pemotongan jumlah pembelian mobil baru di Indonesia, melakukan pemberantasan mafia migas, melakukan persiapan kebijakan hilirisasi tambang, melakukan kebijakan daulatan dan ketahanan energi nasional, melakukan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, dan memperbaiki sistem transportasi Indonesia sehingga dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi.

Kata Kunci: *kenaikkan BBM Tahun 2014, Pendanaan Pembangunan, Indonesia*

PENDAHULUAN

Bahan bakar minyak merupakan salah satu penentu atau penyebab bila terjadi kenaikan harga sehingga menimbulkan efek pengganda (*multiplier effect*) dalam makro perekonomian makro seperti inflasi (Kurniawan : 2015). Hal ini dikarenakan BBM merupakan salah satu faktor input utama dalam agregat supply perekonomian. Pada satu sisi, harga terpaksa dinaikkan agar mencegah kebocoran APBN akibat subsidi BBM yang begitu besar. Pada sisi lain, jika dinaikkan, maka akan mengakibatkan kenaikan harga lain yang memberatkan masyarakat kecil. Merujuk UUD 1945 pasal 33, BBM merupakan

ANALISA KENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF PENDANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

salah satu cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak sehingga diamanatkan untuk dikelola negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kenaikan harga BBM Tahun 2014, jika dicermati terdapat tiga alasan. Pertama, subsidi saat ini sudah tidak tepat sasaran karena lebih banyak dinikmati oleh kalangan menengah ke atas. Kedua, pemberian subsidi dinilai memberatkan APBN. Ketiga, besarnya subsidi diras tidak produktif dan hanya membakar uang saja. Subsidi tersebut dapat digunakan pada sektor produktif seperti infrastruktur, industri, pendidikan, kesehatan. Selain itu, mengurangi subsidi BBM dapat dialihkan untuk kegiatan eksplorasi, riset-riset di bidang minyak dan gas bumi dan sumber-sumber energi alternatif.

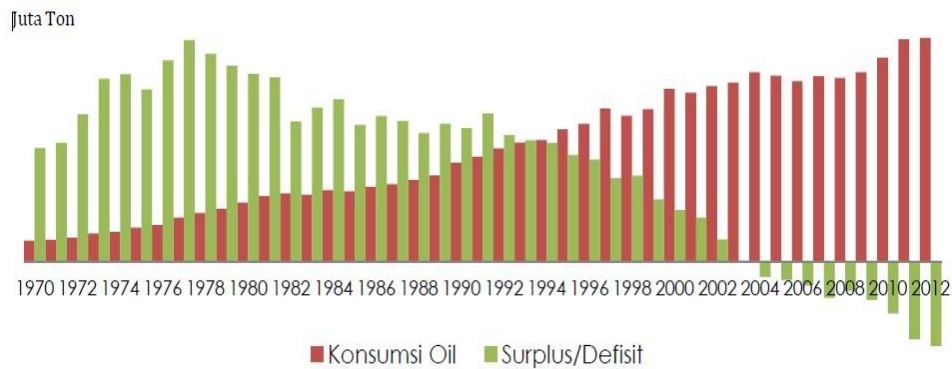
Merujuk data Ditjen Migas Kementerian ESDM RI tahun 2010, cadangan minyak bumi Indonesia sebesar 3,7 milyar barel dari total sumberdaya sebesar 7,4 milyar barel. Cadangan tersebut sangatlah sedikit dibandingkan dengan cadangan negara-negara kaya minyak seperti Venezuela (290 milyar barel), Arab Saudi (260 milyar barel), Iran (155 milyar barel), Irak (140 milyar barel), dan Kuwait (110 milyar barel).

Tingkat lifting minyak bumi Indonesia dilihat dari data mengalami penurunan dari tahun 2010 hingga 2013, yaitu dari 954.000 bph pada tahun 2010, 898.000 bph pada tahun 2011, 860.000 bph pada tahun 2012, dan 825.000 bph pada tahun 2013. Ditambah dengan fakta bahwa banyak dari minyak bumi yang diproduksi berasal dari blok migas milik perusahaan asing. Sedangkan kebutuhan konsumsi minyak bumi Indonesia mengalami peningkatan. Hal itu menjadi hal yang wajar karena Indonesia tengah berusaha dari tahap negara berkembang menjadi negara maju dimana secara langsung pertumbuhan ekonomi akan diikuti dengan lonjakan kebutuhan energi yang signifikan. Konsumsi BBM dari tahun 2000 hingga 2012 didominasi oleh sektor transportasi. Hal ini dikarenakan volume kendaraan dari tahun ke tahun semakin meningkat sehingga permintaan akan BBM juga meningkat. Berikut tabel volume kendaraan dan grafik konsumsi BBM tahun 2000 hingga 2012:

Tahun	Mobil Penumpang	Bis	Truk	Sepeda Motor	Jumlah
2000	3 038 913	666 280	1 707 134	13 563 017	18 975 344
2001	3 189 319	680 550	1 777 293	15 275 073	20 922 235
2002	3 403 433	714 222	1 865 398	17 002 130	22 985 183
2003	3 792 510	798 079	2 047 022	19 976 376	26 613 987
2004	4 231 901	933 251	2 315 781	23 061 021	30 541 954
2005	5 076 230	1 110 255	2 875 116	28 531 831	37 623 432
2006	6 035 291	1 350 047	3 398 956	32 528 758	43 313 052
2007	6 877 229	1 736 087	4 234 236	41 955 128	54 802 680
2008	7 489 852	2 059 187	4 452 343	47 683 681	61 685 063
2009	7 910 407	2 160 973	4 452 343	52 767 093	67 336 644
2010	8 891 041	2 250 109	4 687 789	61 078 188	76 907 127
2011	9 548 866	2 254 406	4 958 738	68 839 341	85 601 351
2012	10 432 259	2 273 821	5 286 061	76 381 183	94 373 324

Sumber : Kantor Kepolisian Republik Indonesia

Gambar 1. Volume kendaraan di Indonesia



Sumber: Konsumsi BBM Indonesia BPS, 2013

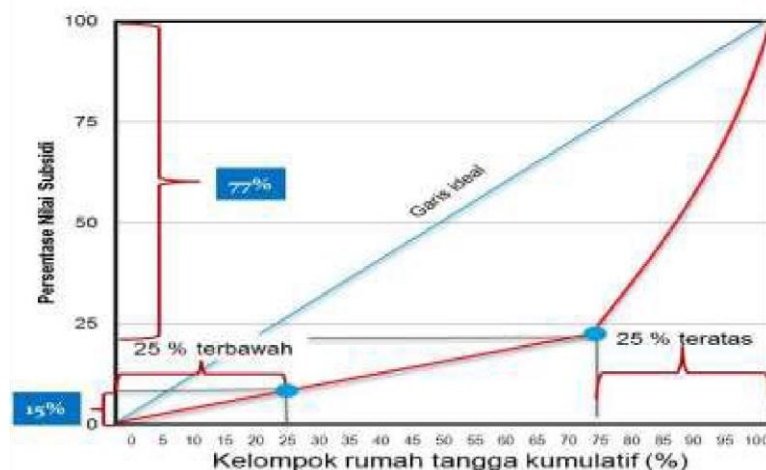
Gambar 2. Grafik Konsumsi dan Produksi Minyak di Indonesia

Dari data yang ada terlihat kondisi bertolak belakang antara volume kendaraan dan konsumsi minyak dengan kinerja produksi minyak Indonesia, dimana volume kendaraan dan konsumsi minyak yang meningkat namun pada sisi lain kemampuan produksi mengalami defisit. Hal ini mulai terjadi pada tahun 2004, di mana Indonesia mengalami defisit minyak sekitar 5 juta ton, yang kemudian meningkat hingga tahun 2012 menjadi defisit 27 juta ton. Konsekuensi defisit adalah adanya kewajiban impor baik dalam bentuk minyak mentah maupun hasil olahan seperti bensin, diesel, dan kerosene untuk

ANALISA KENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF PENDANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

memenuhi permintaan dalam negeri. Akibat dari impor, otomatis akan berdampak pada neraca perdagangan Indonesia. Namun permasalahan tidak selesai disana, kapasitas kilang minyak Indonesia saat itu hanyalah sebesar 1 juta bph. Kilang minyak Indonesia ternyata hanya dapat mengolah kilang minyak sebesar 1 juta bph sedangkan permintaan BBM adalah sebesar 1,5 juta bph. Artinya, Indonesia BBM jadi saat itu. Dengan fakta tersebut, dapat disimpulkan bahwa Indonesia harus mengimpor minyak bumi dan BBM pada waktu yang bersamaan.

Harga minyak mentah pada pasar dunia saat itu berada pada harga \$80/barrel. Dengan harga tersebut, diperkirakan biaya pokok BBM per liter berkisar antara Rp 8.500,00 hingga Rp 10.000,00 (CNN ; 2022). Daya beli masyarakat yang masih tergolong rendah membuat pemerintah agar melakukan subsidi agar menjaga daya beli Masyarakat. Subsidi BBM inilah yang pada akhirnya menjadi penyebab defisit APBN tiap tahunnya. Subsidi pada hakikatnya diberikan kepada rakyat berdaya beli rendah agar tetap dapat melakukan pembelian baran untuk hidupnya. Sedangkan, bahan bakar minyak merupakan barang strategis yang berpengaruh pada makro perekonomian. Awalnya subsidi BBM diberikan karena mayoritas masyarakat kurang mampu untuk membeli BBM. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan membuat daya beli masyarakat juga ikut meningkat. Kini BBM bukan lagi barang yang mewah bagi kaum masyarakat sebagian besar. Pada satu sisi kepemilikan kendaraan bermotor meningkat signifikan. Pada sisi lain, kaum menengah ke bawah tidak banyak yang mengkonsumsi BBM bersubsidi. Berdasarkan data BPS tahun 2010, 77 persen subsidi BBM dinikmati oleh kaum menengah ke atas. Berikut data kelompok rumah tangga kumulatif:



Sumber: BPS, 2012

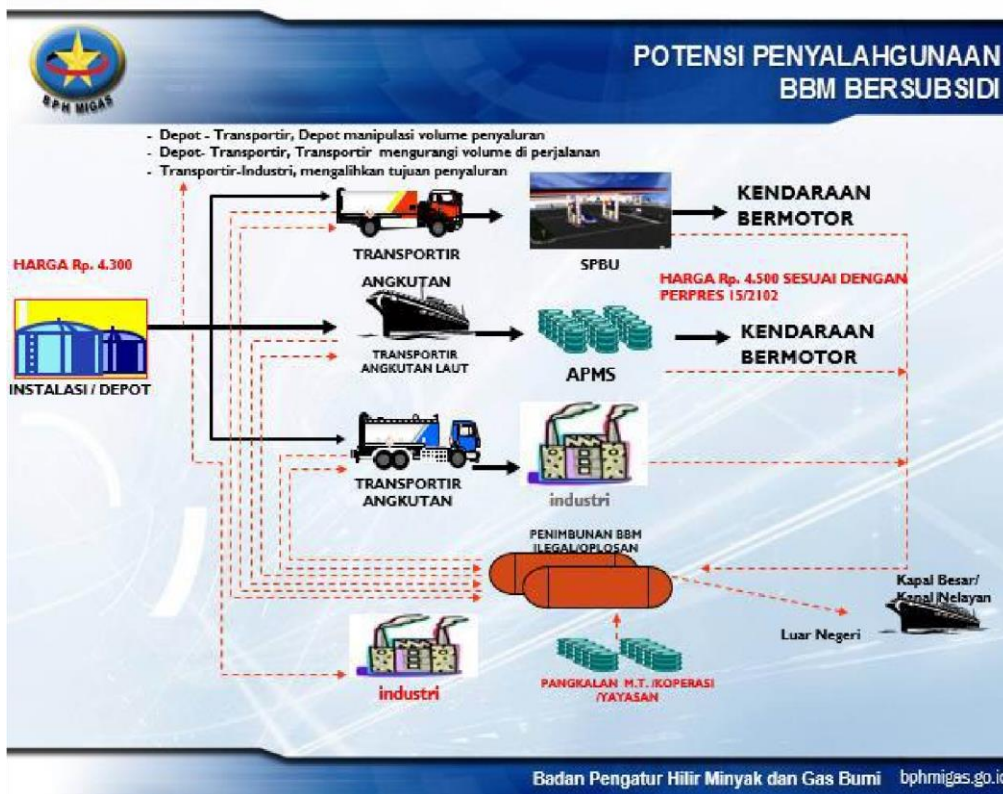
Gambar 3. Kelompok Masyarakat Penikmat Subsidi BBM

Sumber: Ditjen Migas, 2012

Gambar 4. Realisasi Konsumsi Premium

Dari beberapa data di atas, premium merupakan jenis BBM yang menyerap subsidi terbanyak yaitu sebesar 60 persen atau setara 23,1 juta KL dari total perkiraan realisasi BBM bersubsidi tahun 2014 sebesar 38,38 juta KL. Berdasarkan sektor pengguna BBM bersubsidi, sektor transportasi (darat) menggunakan 89 persen atau setara 32,49 juta KL dari perkiraan realisasi BBM bersubsidi 2014 sebanyak 38,38 juta KL. Konsumsi premium pada sektor transportasi (darat) didominasi oleh mobil pribadi sebesar 53 persen atau setara 13,3 juta KL dari total konsumsi premium untuk transportasi darat. Dari sisi kewilayahan, Jawa-Bali mengkonsumsi 59 persen kuota premium nasional, dimana sebesar 30 persennya dikonsumsi di Jabodetabek atau sama dengan 18 persen konsumsi premium nasional. Selain itu, adanya disparitas harga antara harga bahan bakar minyak bersubsidi dengan bahan bakar minyak non subsidi pada akhirnya menimbulkan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Banyak sekali terjadi penyelundupan bahan bakar minyak bersubsidi ke industry yang sebenarnya tidak boleh mengkonsumsinya. Hal ini dikarenakan minimnya pengawasan kawasan perbatasan dan campur tangan negara lain turut serta memberi andil penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri.

ANALISA KENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF PENDANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA



Gambar 5. Potensi Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode studi literatur perhitungan subsidi bahan bakar minyak di Indonesia. (Nikmah : 2018) Adapun perhitungan subsidi BBM sama dengan volume BBM dikalikan harga patokan yang telah dikurangi harga jual eceran (belum termasuk pajak).

Harga patokan dihitung setiap bulan berdasarkan MOPS rata-rata pada periode satu bulan sebelumnya ditambah biaya distribusi dan margin (Perpres No. 71 Tahun 2005, pasal 1 (6) yaitu Harga Patokan = MOPS ditambah ALPHA. MOPS (*Mean of Platts Singapore*) adalah indeks pasar produk minyak yang merupakan harga transaksi jual beli di Pasar Singapura yang dipublikasikan secara harian. Alpha ditentukan oleh pemerintah atas persetujuan DPR. Perhitungan alpha untuk RAPBN-P 2012 sama dengan APBN 2012 dengan menggunakan formula sebagai berikut yaitu Alpha = MOPS ditambah biaya distribusi yang terkait dengan MOPS, biaya angkut (bahan bakar) tanker, truk, dan losses (dinilai dalam prosentase terhadap MOPS, dalam US\$/barel) dan

biaya tetap seperti biaya operasi dan perawatan depo, *fee* penjualan ke SPBU dan Margin Badan Usaha pelaksana PSO (dalam rupiah/liter).

Harga eceran adalah harga yang sama dengan harga patokan apabila tidak ada subsidi. Dengan adanya subsidi, harga eceran selalu dibawah harga patokan. Angka alpha diperoleh dari penjumlahan biaya transportasi BBM dari kilang atau penyediaan sampai dengan penyalur ditambah dengan angka margin. Biaya yang diperhitungkan antara lain *Freight Cost* (Darat, Laut atau Udara), *Insurance*, *Working Capital*, *Depreciation*, *Storage and Handling Cost*, *Losses*, *Marketing Cost*, *Wholesale Margin*, *Retail Margin*.

Secara sederhana angka anggaran subsidi dapat dihitung dengan formula harga patokan yang merupakan harga MOPS (*Mean of Platts Singapore*) ditambah alpha (biaya distribusi dan margin keuntungan). MOPS sendiri adalah penilaian produk untuk trading minyak di kawasan Asia yang dibuat oleh Platts (anak perusahaan McGraw Hill). Mengacu pada keputusan Menteri ESDM Republik Indonesia No. 2187 K/ 12/MEM/2014, biaya alpha (distribusi dan margin) untuk masing-masing produk adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Biaya Alpha

No. Produk	Biaya Distribusi dan Margin
1 Bensin Premium dan Biopremium	(3,32% x MOPS)+484/liter
2 Minyak tanah	(2,17% x MOPS)+521/liter
3 Minyak Solar dan Biosolar	(2,49% x MOPS)+263/liter

Sumber: Olah data peneliti, 2014

Dengan mengacu pada MOPS 2014 sebesar USD 99,6 per barel dan nilai tukar rupiah 1 dollar seharga Rp 12.000. maka akan didapatkan harga MOPS yakni Rp 7.516 per liter. Dengan mengacu pada nilai MOPS ini, maka harga patokan untuk masing masing produk BBM bersubsidi adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Harga Patokan BBM

No.	Produk	Harga Patokan (rupiah/liter)
1	Bensin	8250,54
2	Solar	8201,09
3	Minyak Tanah	7967,15

Sumber: Olah data peneliti, 2014

Pada tahun 2014 ini, harga eceran untuk masing-masing produk BBM bersubsidi adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Harga Eceran BBM

No.	Produk	Harga Eceran (rupiah/liter)
1	Bensin	6500

ANALISA KENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF PENDANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

2	Solar	5500
3	Minyak Tanah	2500

Sumber: Olah data peneliti, 2014

Dengan nilai pajak yang dimaksud adalah pajak pertambahan dengan nilai 10 persen ditambah pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5 persen, sehingga (harga eceran-pajak) masing-masing produk adalah sebagai berikut : **Tabel 4.**

Harga Eceran BBM–Pajak

No.	Produk	Harga Eceran-Pajak
1	Bensin	5525
2	Solar	4675
3	Minyak Tanah	2125

Sumber: Olah data peneliti, 2014

Dari hitung-hitungan tersebut maka besarnya biaya subsidi per liter untuk masing-masing produk sebagai berikut:

Tabel 5. Biaya Subsidi BBM

No.	Produk	Biaya Subsidi (rupiah/liter)
1	Bensin	2725,54
2	Solar	3526,10
3	Minyak Tanah	5842,15

Sumber: Olah data peneliti, 2014

Dalam APBN-P 2014, anggaran subsidi BBM adalah sebesar 246,49 triliun dengan alokasi BBM bersubsidi di reduksi menjadi 46 juta kiloliter dengan rincian 29,43 juta kliter premium, 15,67 juta kliter solar dan 0,9 juta lliter minyak tanah. Dengan mengkalikan biaya subsidi perliter dengan alokasi tiap BBM bersubsidi ini, maka akan didapat anggaran subsidi BBM sebagai berikut:

Tabel 6. Anggaran Subsidi BBM

No.	Produk	Anggaran Subsidi
1	Bensin	Rp 80.212.786.573.585
2	Solar	Rp 55.253.981.086.793
3	Minyak Tanah	Rp 5.257.938.566.038
TOTAL		Rp 140.724.706.226.415

Sumber: Olah data peneliti, 2014

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk BBM berjenis premium, pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000, maka harga jual eceran BBM bersubsidi menjadi Rp 8.500/ltr (Rp 2.000 + Rp 6.500), dengan demikian maka subsidi yang masih ditanggung didalam anggaran negara yakni sebesar Rp 534/liter (Rp 9.034 dikurangi Rp 8.500) atau sebesar Rp 15.742.320.000.000,00 (Rp 534 x 29,48 juta kilo liter). Dengan demikian, ada penghematan dari subsidi rill yang seharusnya ditanggung pemerintah sebesar Rp 58,96 triliun (Rp 74,70 triliun – Rp 15,74 triliun). Jika ditambahkan dengan penghematan dalam APBN sebesar Rp 33,6 triliun, maka total dana yang bisa dihemat oleh pemerintah yaitu sebesar Rp 92,56 triliun (Rp 58,96 triliun + Rp 33,6 triliun), yang terdiri dari Rp 33,6 triliun yang dihemat dari APBN sebelum kenaikan dan Rp 58,96 triliun dana yang berhasil dihemat setelah kenaikan Rp 2.000/liter.

Untuk BBM berjenis solar, pemerintah Indonesia menaikkan harga BBM sebesar Rp 2.000, maka harga jual eceran BBM bersubsidi menjadi Rp 7.500/liter (Rp 2.000 + Rp 5.500), dengan demikian maka subsidi yang masih ditanggung pemerintah yakni sebesar Rp 1.534/liter (Rp 9.034 – Rp 7.500) atau sebesar Rp 24.175.840.000.000,00 (Rp 1.534 x 29,48 juta kilo liter). Dengan demikian, terjadi penghematan dari besarnya subsidi rill yaitu sebesar Rp 31,52 triliun (Rp 55,69 triliun – Rp 24,17 triliun). Jika ditambahkan dengan penghematan yang berhasil dilakukan dalam APBN sebesar Rp 24,51 triliun, maka total dana yang dihemat oleh pemerintah yakni sebesar Rp 56,03 triliun (Rp 31,52 triliun + Rp 24,51 triliun), yang terdiri dari Rp 24,51 triliun yang dihemat dari APBN sebelum kenaikan, dan Rp 31,52 triliun dana yang berhasil dihemat setelah terjadi kenaikan harga BBM Solar Rp 2.000/liter.

Dengan pemaparan diatas, dapat terlihat jelas bahwa dengan adanya kenaikan BBM, maka dana hasil berhemat tersebut bisa diikuti dengan penghematan di sektor lainnya misalnya menghemat belanja birokrasi dapat menjadi dana tambahan mengingat belanja rutin yang harus dikeluarkan semakin besar antara lain gaji pegawai, pembayaran pokok dan bunga utang, serta alokasi 20 persen untuk dana pendidikan. Pengurangan subsidi bahan bakar minyak merupakan cara tepat pemerintah untuk mendapatkan tambahan anggaran belanja sehingga dapat digunakan untuk mendanai pembangunan di Indonesia seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan sektor lainnya.

Dampak kenaikan BBM dalam perspektif pendanaan pembangunan di Indonesia yaitu pertama adalah penghematan terhadap keuangan pemerintah. Dengan mengurangi subsidi untuk hal kurang produktif, maka akan ada dana segar baru yang dapat dipergunakan mendanai program yang bermanfaat bagi

ANALISA KENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF PENDANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

masyarakat. Dana tersebut dapat dipakai untuk tambahan anggaran pendidikan, program pengentasan kemiskinan, menciptakan lapangan kerja baru dan pembangunan infrastruktur dan program lainnya yang lebih manfaat.

Dampak positif yang kedua adalah mengurangi defisit anggaran. Dengan melakukan pengurangan subsidi BBM, defisit anggaran akan turun menjadi Rp 109,8 Triliun atau 2,23 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jika pemerintah, tidak melakukan kebijakan untuk mengurangi subsidi BBM, defisit anggaran dapat melonjak menjadi Rp 299 Triliun atau 3,59 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit anggaran yang terlalu tinggi tentu tidak baik bagi keuangan negara. Merujuk pada krisis di Eropa juga salah satunya dipicu oleh defisit anggaran yang terlalu tinggi.

Dampak positif ketiga adalah kontrol terhadap konsumsi BBM. Dengan adanya kenaikan harga BBM bersubsidi karena pengurangan subsidi, tentu akan membuat pemilik kendaraan bermotor lebih selektif dalam aktivitasnya untuk menggunakan kendaraan bermotor karena harga BBM yang lebih mahal. Dengan demikian, konsumsi atas BBM bersubsidi dapat terkontrol dan tidak berlebihan serta tidak membebani keuangan pemerintah.

Dampak positif keempat adalah penghematan terhadap pemakaian minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber daya alam yang tidak terbarukan. Suatu saat, cadangan minyak bumi akan habis, dan butuh waktu jutaan tahun untuk menghasilkan minyak bumi lagi. Terkontrolnya pemakaian BBM berdampak terhadap eksploitasi minyak bumi yang bisa dikurangi. Dengan demikian, cadangan minyak bumi bisa lebih lestari lagi.

Dampak positif kelima adalah pengembangan energi alternatif yang lebih murah dan terbarukan daripada BBM. Harga BBM bersubsidi yang lebih mahal akan memacu pihak- pihak tertentu untuk berpikir kreatif untuk mencari dan mengembangkan energi alternatif selain BBM. Dengan energi alternatif, masyarakat tidak bergantung terhadap keberadaan BBM. Selain itu pula, energi alternatif nantinya akan lebih ramah lingkungan daripada BBM.

Dampak positif keenam adalah kelestarian lingkungan. Residu hasil pembakaran BBM yang dilepas ke udara punya potensi membahayakan bagi kesehatan manusia dalam jangka panjang dan terakumulasi dalam jumlah besar. Pengurangan subsidi BBM mencegah konsumsi BBM secara berlebihan. Sehingga, pencemaran lingkungan dan udara bisa dikurangi. Lebih jauh lagi, dengan lingkungan hidup yang lebih sehat, memperkecil peluang masyarakat untuk mengalami gangguan kesehatan sebagai akibat lingkungan hidup dan kondisi udara yang tidak baik bagi kesehatan. Dengan demikian, biaya yang timbul, seperti biaya kesehatan akibat gangguan kesehatan karena lingkungan dan udara yang tercemar bisa berkurang.

Dampak positif ketujuh adalah mengurangi tindak kejahatan penyelundupan BBM. Dengan naiknya harga BBM bersubsidi, disparitas harga BBM di Indonesia dan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura bisa dipangkas. Perbedaan harga yang semakin kecil itu membuat penyelundup tidak tertarik menyelundupkan BBM bersubsidi karena keuntungan menjadi lebih kecil sementara resiko yang harus dihadapi besar. Sehingga, BBM bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia yang memang berhak terhadap penggunaan BBM bersubsidi itu.

SIMPULAN

Adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang berarti pengurangan subsidi BBM akan berdampak adanya anggaran tambahan atau dana segar baru untuk pendanaan pembangunan di Indonesia. Tentunya kebijakan harus diikuti oleh beberapa kebijakan lainnya. Berikut saran yang dapat diajukan antara lain:

- a) Adanya kenaikan pajak yang signifikan untuk perusahaan produsen kendaraan berbahan bakar BBM sekaligus pengendalian dan pemotongan jumlah pembelian mobil baru di Indonesia.
- b) Adanya pemberantasan mafia migas.
- c) Adanya upaya melaksanakan hilirisasi tambang menuju kedaulatan dan ketahanan energi Nasional.
- d) Melakukan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan serta mempersiapkan pasar dan infrastruktur pendukungnya, terutama biofuel.
- e) Memperbaiki sistem transportasi Indonesia sehingga dapat menekan penggunaan kendaraan pribadi.

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Universitas Indraprasta PGRI Jakarta yang telah mensupport kegiatan penelitian hingga terbitnya artikel ini. Terimakasih juga kepada Team Journal UTILITY Universitas Nurul Huda yang telah memberikan kesempatan untuk dapat mempublikasikan artikel ini.

REFERENSI

- Gie, Kwik Kian. 2004. *Apakah subsidi BBM sama dengan uang keluar?*. Bisnis Indonesia
- Kurniansyah, D., & Hakim, H. L. (2018). Penerapan Peraturan BPH Migas Nomor 6 Tahun 2015 Terhadap Pelaku Usaha Pertamina/Pommini di

ANALISA KENAIKKAN HARGA BAHAN BAKAR MINYAK TAHUN 2014 DALAM PERSPEKTIF PENDANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

- Kabupaten Karawang Tahun 2018. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 3(2), 215-230.
- Kurniawan, D. A., Wismadi, A., & Adji, A. (2015). Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak Melalui Insentif Fiskal Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(2), 93-103.
- Prananingtyas, P., Irawati, N. D., & Naridha, A. N. F. (2021, October). Urgency of Changes in Structure and Governance in the Downstream Oil and Gas (BPH MIGAS) Regulatory Agency as an Independent Institution. In *ICOLEG 2021: Proceedings of the 2nd International Conference on Law, Economic, Governance, ICOLEG 2021, 29-30 June 2021, Semarang, Indonesia* (p. 475). European Alliance for Innovation.
- News Redaksi CNBC Indonesia. (2022, Oktober 03) Retrieved from. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221003151901-4-376831/harga-minyak-di-level-us--80-an-barel-pertalite-bisa-rp7650>.
- Badan Pusat Statistik. 2020. Pengguna Subsidi BBM.
- Dewi, R., & Andrianus, H. F. (2021). Analisis pengaruh kebijakan bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kemiskinan di indonesia periode 2005-2015. *Menara Ilmu*, 15(2).
- Statistik, B. P. (2017). Analisis Isu Terkini. *Badan Pusat Statistik*, 31-62.
- Statistik, B. P. (2015). Inflasi. *Diunduh pada tanggal, 3*. Badan Pusat Statistik. 2020. Konsumsi Minyak Indonesia.
- Sa'adah, A. F. (2016). *Analisis Penyediaan Dan Konsumsi Bahan Bakar Minyak Indonesia* (Doctoral dissertation, Bogor Agricultural University (IPB)).
- Energi, K. Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi. 2013. *Surat keputusan direktur jenderal minyak dan gas bumi nomor, 313*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2015. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Kepolisian Republik Indonesia. 2015. Volume Kendaraan Harian di Indonesia.
- Indonesia, S. (2018). *Land Transportation Statistics 2015*. Statistics Indonesia.
- World Bank. 2000. *Indonesia oil and gas sector study*. Washington: The World Bank.
- Nikmah, R. F. (2018). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) DI INDONESIA TAHUN 1996-2016.
- Cadangan Minyak bumi Indonesia. Retrieved from : <https://migas.esdm.go.id/post/read/icp-tahun-2010>